

H A R I A N

LENTERAInspirasi Perubahan **TODAY**HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 HalamanE-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya"Nothing is better than
going home to family
and eating good food
and relaxing."

Irina Shayk, model

EDISI KAMIS / 16 Juli 2020

**DUH, ORANG MISKIN RI
BENGGKAK JADI 26,42 JUTA**

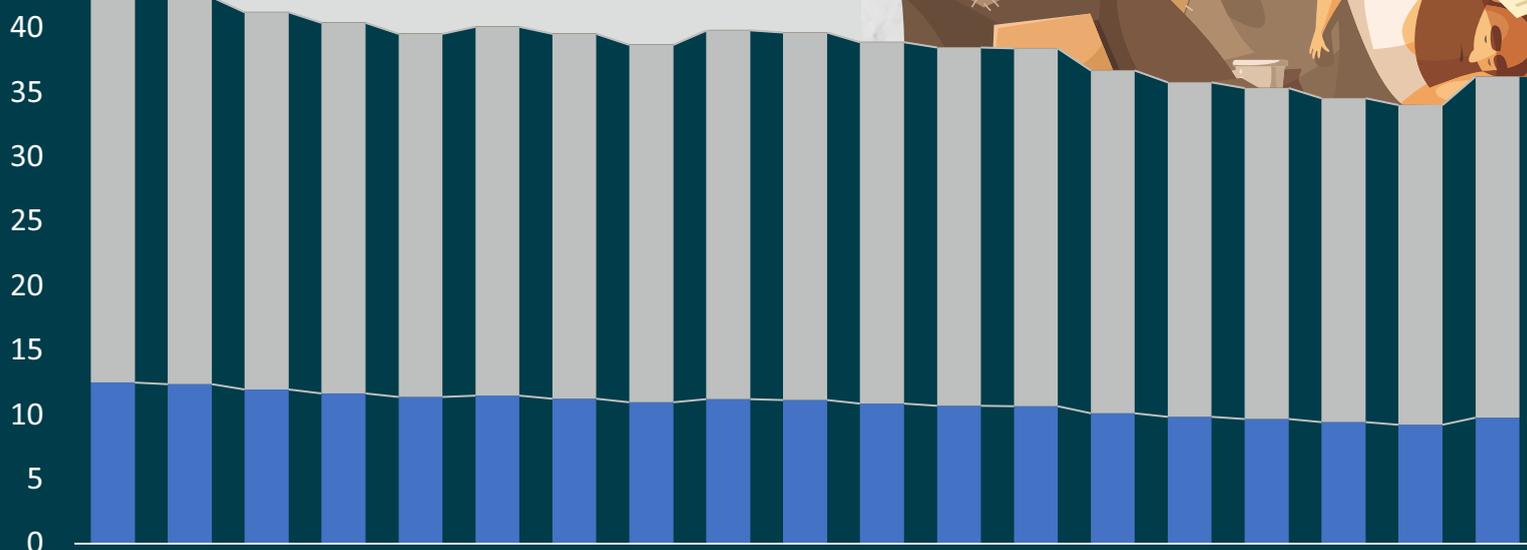
Dampak dari pandemi Covid-19 makin terbukti nyata. Selama tiga tahun tren penurunan kemiskinan di Indonesia langsung mandek gara-gara virus ini. Pada Maret 2020 terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang. Sehingga kini jumlah warga RI yang ada di 'garis merah' ekonomi tercatat sebanyak 26,42 juta orang. Di sisi lain, wabah corona makin tak terbendung. Per 15 Juli 2020 angka total kasus positif tembus 80.094 kasus. Meski jumlah pasien sembuh mencatat rekor yaitu 1.414 pasien, tapi kematian akibat corona juga berada di titik tertinggi sebanyak 87 orang dalam sehari. Apa kabar anggaran penanganan pandemi Rp 686,2 triliun?

*Baca Hal 11***UPDATE PERKEMBANGAN VIRUS CORONA**

	KASUS POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
INDONESIA	80,094	39,050	3,797
Seluruh Dunia	13,323,530	7,399,310	578,628

Update : 15 Juli 2020 Pukul 15.47 PM

Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins



Mar, Sep, Mar, 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020

■ Tingkat Kemiskinan % ■ Jumlah Orang Miskin (Juta)

MAU PERGI-PERGI SAAT PANDEMI? WAJIB ISI E-HAC DULU

Jakarta- Pandemi Covid-19 memang mengubah semua tata cara kehidupan manusia. Dalam melakukan perjalanan di dalam negeri saja, masyarakat harus mengisi e-HAC dulu. Apalagi ini?

Electronic-Health Alert Card (e-HAC) adalah Kartu Kewaspadaan Sehat versi modern dari kartu manual yang sempat digunakan sebelumnya. "Fungsinya untuk pengawasan pelaku perjalanan yang datang dari daerah terjangkau baik internasional dan domestik," jelas dr I Made Yosi Purbadi Wirentana selaku Kepala Seksi Karantina Kesehatan Wilayah dan Pos Lintas Batas Darat Kemenkes dikutip Rabu (15/7). Made menjelaskan, e-HAC ditujukan bagi semua pelaku perjalanan internasional dan domestik selama masa pandemi Covid-19.

Untuk diketahui, aturan ini berlaku pasca Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.01/MENKES/382/2020. SE tersebut mengatur mengenai Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman terhadap Covid-19. Dalam SE yang ditandatangani Terawan pada 26 Juni 2020 tersebut, sejumlah peraturan dikeluarkan sebagai prasyarat untuk melakukan perjalanan dalam negeri.



Made juga menjelaskan, e-HAC diperlukan untuk semua pelaku perjalanan baik udara, pelabuhan, maupun untuk pos lintas batas darat negara. Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan, e-HAC telah disosialisasikan per tanggal 1 Mei 2020. Sementara itu, melansir dari Panduan Pengguna Aplikasi E-HAC, sistem ini dikembangkan oleh Kemenkes, dalam hal ini Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Disebutkan bahwa Sistem Health Alert Card (HAC) diharapkan dapat mendukung kemudahan akses pelayanan kepada semua calon penumpang dengan tujuan Indonesia untuk didata sebagai kontrol bagi negara terhadap risiko terjadinya penyebaran penyakit yang dibawa oleh penumpang.

Untuk mendapatkan Kartu Kewaspadaan

Kesehatan, masyarakat dapat memperolehnya dengan mengunduh aplikasi e-HAC melalui Play Store. E-HAC juga bisa diisi dengan cara mengakses <https://inahac.kemkes.go.id>. Kartu kewaspadaan ini diisi saat keberangkatan baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Mengutip dari Surat Edaran Kemenkes tersebut di atas, saat pembelian tiket pesawat dan/atau kapal, penumpang yang akan melakukan perjalanan dalam negeri wajib menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif kepada pihak maskapai/operator pelayaran/agen perjalanan secara elektronik maupun non-elektronik. Selain itu, diharuskan telah mengunduh aplikasi e-HAC serta telah mengisinya. Nantinya

Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan keberangkatan akan memastikan bahwa kartu kewaspadaan tersebut telah diisi dan memverifikasinya. Adapun Dinas Kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota nantinya dapat mengakses informasi kedatangan pelaku perjalanan dalam negeri yang melalui bandara atau pelabuhan ke wilayahnya melalui aplikasi e-HAC tersebut. (ist)

DUA KADISNYA POSITIF CORONA, RISMA TAK KARANTINA MANDIRI

Surabaya- Dua kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Mereka adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil Agus Imam Sonhaji, yang saat ini sudah dinyatakan sembuh dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya Chandra Oratmangun.

Chandra kemudian meninggal karena menderita pneumonia methicilin-resistant aureus (MRSA). Sebelum meninggal, Chandra dinyatakan negatif setelah menjalani dua kali tes swab lanjutan. Meski demikian, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak melakukan karantina mandiri.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatarata mengatakan, Risma tak pernah bertemu setelah dua kepala dinas itu dinyatakan positif Covid-19. "Tidak ada kontak (langsung). Kontak (koordinasi) lewat telepon," kata Febri, Rabu (15/7).

Sebelum dinyatakan positif Covid-19, Risma juga jarang bertemu dengan Chandra dan Agus. Biasanya, pertemuan itu diadakan



Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat sidang protokol kesehatan di Pasar Keputran

sekali dalam dua pekan. Sebab, Agus dan Chandra memiliki tugas masing-masing, khususnya terkait pelayanan langsung kepada masyarakat. Lagipula, jarak antara Balai Kota Surabaya dan Kantor DP5A serta Dispendukcapil cukup jauh.

"Kalau sama saya, Pak Fikser, sering ketemu. Kalau sama Pak Agus dan Bu Chandra, enggak sering. Bisa-bisa dua minggu sekali. Berbeda waktunya," kata dia.

Menurut Febri, Risma paling sering bertemu dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya M Fikser, Kepala Dinas Kesehatan Febria Rachmanita, dan Kepala BPB Linmas Kota Surabaya Irvan Widyanto. Tapi, pertemuan itu tak terjadi sehari-hari.

Selain itu, Risma bersama jajarannya menggelar rapat di halaman Balai Kota

Surabaya. Jarak antara peserta rapat juga dijaga sesuai protokol kesehatan. Para pejabat yang sakit atau mengalami gejala Covid-19 tak diizinkan mengikuti rapat.

"Kalau seumpama ada OPD yang pejabatnya terjangkau Covid-19, kantornya di-lockdown. Walaupun enggak ada yang positif, tapi sakit, dia nunggu (isolasi mandiri) apakah ada tanda-tanda (gejala Covid-19) atau tidak," jelas Febri.

Selama ini, Risma kerap memberikan instruksi kepada jajarannya lewat aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Line. Komunikasi lewat daring itu telah dilakukan sejak lama, bahkan sebelum pandemi Covid-19.

Saat ini, Risma beraktivitas seperti biasa. Wali Kota perempuan itu turun ke lapangan menemui masyarakat untuk menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan. Febri menyebut, Risma memimpin operasi penertiban penggunaan masker di Pasar Keputran pada Rabu pagi. "Tadi pagi masih teriak-teriak kok di Pasar Keputran. Ini hari kedua Ibu ke Pasar Keputran," ujar dia. Ia juga memastikan bahwa kondisi kesehatan Risma selalu diperhatikan dan diperiksa setiap hari. "Itu pasti dan rutin," jelas Febri. (ard)

SOAL PERJALANAN DINAS RP 8,1 M, KEMENTERIAN DESA HUJAN KRITIK DARI DPR

Jakarta – Komisi V DPR mencecar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait temuan BPK terhadap dana perjalanan dinas PNS sepanjang 2019 yang mencapai Rp 8,1 miliar. Hujan kritik dilontarkan dalam rapat bersama antara pemerintah dan legislatif pada Rabu (15/7).

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Hasan Basri Agus mengatakan temuan ini merupakan hal yang memalukan. "Masalah uang perjalanan dinas ini memalukan. Terlalu besar terjadi penyimpangan," ujarnya di kompleks Parlemen.

Meski Kementerian telah menindaklanjuti sebagian temuan tersebut, tutur dia, semestinya kesalahan ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Apalagi, penyelewengan dana perjalanan dinas umumnya bermodus titipan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang merupakan model kecurangan lawas.

Cecaran senada dilontarkan Partai Gerindra, Eddy Santana. Dia mengatakan temuan terhadap dana perjalanan dinas sulit dikembalikan. Sebab, nilai yang diterima oleh PNS umumnya berupa pecahan kecil di bawah Rp 10 juta.

Dia menyarankan, sebagai bentuk perbaikan struktur kelembagaan, Kemen-

terian harus mengatur agar perjalanan dinas memperoleh izin lebih dulu dari eselon I dan II. "Ini harus jadi perhatian ke depan harus dikontrol. Jadi tidak ada perjalanan fiktif," tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi V lainnya dari Fraksi PDIP, Bambang Suryadi, menilai Kementerian Desa dan PDPT mesti membereskan perkara-perkara perjalanan dinas pada tahun mendatang agar tidak menjadi temuan BPK selanjutnya. Dia juga meminta penjelasan secara rinci terkait temuan tersebut, apakah hal ini berhubungan dengan kelebihan bayar atau kecurangan surat perjalanan dinas. "Kalau terkait kelebihan bayar, berarti pengelola perjalanan dinas perlu dikoreksi," katanya.

Menteri Desa dan PDPT Abdul Halim Iskandar sebelumnya menerangkan temuan terkait perjalanan dinas senilai Rp 8,1 miliar telah ditindaklanjuti oleh Kementerian sebesar Rp 3,9 miliar. "Jadi 48,91 persen sudah kami selesaikan," ujarnya.

Meski demikian, Abdul mengaku kaget saat pertama kali mendapati rekomendasi BPK. Setelah itu, Abdul pun memastikan pihaknya telah menelusuri dana Rp 8,1 miliar ini dan menemukan beberapa masalah yang melatari adanya temuan.



Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Abdul Halim Iskandar

"Perjalanan dinas mengapa temuan (perjalanan dinas) besar karena waktunya beririsan. Misalnya, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, itu dihitung dua kali," tuturnya. Kemudian, ada pula PNS yang sebelum berangkat ke luar kota melakukan absen digital (finger print) lebih dulu di kantornya sehingga terjadi perekapan ganda.

"Kami sedang cari solusinya, termasuk berita acara penugasan penghapusan finger print atau berita acara dia keluar kota tapi sudah finger print," ucapnya. (tmp)

DPRD JATIM MINTA PEMPROV FOKUS JAGA STOK PANGAN

Surabaya- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) berharap ketersediaan stok kebutuhan pokok aman hingga akhir 2020. Sebab, pangan menjadi persoalan sangat strategis di tengah pandemi Covid-19.

"Kami meminta Kepala Dinas Pertanian fokus pada ketersediaan pangan hingga akhir tahun," Anggota Komisi B DPRD Jatim, dr Agung Mulyono, di ruang kerjanya DPRD Jatim, Rabu (15/7).

Menurut politisi Demokrat ini, ada beberapa sektor yang rentan terdampak pagebluk. Diantaranya sektor pekerjaan karena banyaknya pengangguran akibat berhentinya kegiatan ekonomi, sektor ketersediaan pangan, dan sektor ketahanan kesehatan.

Ketika ketiga sektor itu tidak bisa dikelola dengan baik, kata dr Agung, akan berpengaruh pada ketahanan pangan dan kedaulatan negara secara keseluruhan. "Karena itu semua elemen perlu bekerjasama secara serius melawan ancaman pandemi agar ketahanan pangan tetap terjaga," ungkapnya.

Di samping itu, ketaatan protokol kesehatan sangat penting untuk tetap diterapkan. Hal ini mengingat penerapan new normal telah dipersiapkan. "Jadi, ketaatan protokol kesehatan sangat perlu dilakukan oleh semua masyarakat," imbuh-

nya. Oleh sebab itu, politisi asal Dapil Banyuwangi ini menilai ketahanan pangan bisa menjadi masalah yang sangat urgent di era saat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menyerang sedikitnya 125 negara termasuk Indonesia. Ketika pandemi itu berakhir, negara-negara yang terdampak itu akan fokus atau mengutamakan ketahanan pangan mereka sendiri. "Nah, di Jatim juga harus memikirkan itu juga," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil ketua Komisi B DPRD Jatim, Amar Saifuddin, juga meminta penjelasan dan kepastian akan ketersediaan stok pangan di Jatim. Amar yang juga Politisi asal Fraksi PAN ini juga meminta kepada Satgas Pangan Jatim untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal pengawasan dan penindakan kepada pelaku usaha. Baik perseorangan maupun badan usaha yang memainkan harga atau melakukan penimbunan bahan makanan pokok yang ada di Jatim. "Karena selama ini, Komisi B memandang kinerja satgas pangan belum optimal, karena masih ditemukan dilapangan adanya tindakan penimbunan bahan makanan pokok (gula) di Jatim," pungkasnya.

Tambahan Pupuk Subsidi

Sebelumnya, Dinas Pertanian dan



Anggota Komisi B DPRD Jatim, dr Agung Mulyono

Ketahanan Pangan Jawa Timur berencana mengajukan kembali permintaan pupuk subsidi ke Kementerian Pertanian. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Hadi Sulistyono menjelaskan tahun ini Jatim mendapatkan alokasi pupuk subsidi sebesar 2,2 juta ton.

Ia memperkirakan, stok tersebut akan habis pada bulan September 2020, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pada bulan Oktober-Desember 2020 pihaknya akan mengajukan kembali ke Kementerian Pertanian.

Namun begitu, sebelum mengajukan kembali ke pemerintah pusat, pihaknya akan mengevaluasi terlebih dahulu serapan pupuk subsidi di kabupaten/kota di Jawa Timur. "Masih banyak kabupaten yang belum terserap sepenuhnya. Untuk itu kami akan realokasi terlebih dahulu," ujar Hadi, Selasa (14/7). (ist,ufi)

RAPAT DENGAN JOKOWI, KHOFIFAH DIMINTA SANKSI PELANGGAR PROTOKOL COVID-19

Bogor- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberi sedikit bocoran hasil rapat terbatas (ratas) soal Virus Corona dengan Presiden Jokowi. Warga Jatim harus siap-siap disanksi bila melanggar protokol kesehatan. Pasalnya, Jatim masih bertahan menjadi Provinsi di Indonesia dengan angka kasus Virus Corona atau covid-19 tertinggi. Penerapan sanksi ini bertujuan agar masyarakat lebih disiplin dan penularan bisa dikurangi.

"Memang seyogyanya ada sanksi, apakah itu denda maupun administrasi. Supaya ada peningkatan kedisiplinan masyarakat," ujar Khofifah Indar Parawansa usai rapat yang digelar Presiden Jokowi dengan para gubernur di Istana Bogor, Rabu (15/7).

Khofifah menyebut, dalam rapat itu Jokowi meminta para gubernur seluruh Indonesia menegakkan kedisiplinan publik terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Khofifah menyampaikan, peningkatan kedisiplinan masyarakat harus diiringi upaya pergerakan roda perekonomian kembali.

Dia mengatakan, Presiden terus mengingatkan kepala daerah untuk mengetahui kapan harus menerapkan dan menghentikan kebijakan pelonggaran. "Kepala daerah harus bisa melakukan deteksi secara kontinyu. Jadi pergerakan ekonomi dan Covid-19 bisa dikendalikan," jelasnya.

Dia menyebut, selama enam hari terakhir tingkat kesembuhan pasien covid-19 di Jawa Timur tertinggi se-Indonesia. Per hari Rabu, Khofifah menerima laporan jumlah pasien sembuh di Jatim mencapai 500 orang.

"Jadi begini sekarang ini sudah 6 hari berturut-turut Alhamdulillah kesembuhan pasien Covid-19 di Jawa Timur itu terbanyak se Indonesia. Enam hari berturut-turut. Pada posisi negatif dua kali," katanya.

Sebelumnya diketahui Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dr. Dewi Nur Aisyah menyebutkan potensi penyebaran, sampai saat ini Provinsi Jawa Timur telah tercatat terdapat 141 klaster dari total 2004 total kasus yang ada. "Dari klaster itu yang paling banyak terjadi dari lokal transmisi ada 34 klaster yang artinya, ada di sebuah kelompok masyarakat di wilayah yang sama ada riwayat berpergian yang jadi tertular," untkannya.

Sedangkan untuk data klaster lainnya, terdapat 31 klaster untuk pasar, 26 klaster di rumah sakit dan 20 klaster untuk tempat kerja. Kemudian, klaster terendah ada di 2 klaster untuk seminar dan tempat ibadah serta 1 klaster untuk mal dan pesantren. "Pekerjaan rumah saat ini adalah menurunkan angka kematian dan kasus," ujarnya.

Dia menambahkan, hingga saat ini pe-



Gubernur Jatim, Khofifah Indarparawansa

menuhan berbagai kebutuhan tes covid baik PCR maupun tes cepat molekuler terus dikoordinasikan dengan Gugus Tugas pusat. Provinsi Jawa Timur mencatat angka kesembuhan pasien positif covid-19 tertinggi nasional selama lima hari berturut-turut. (ist)

MILIKI KETAHANAN EKONOMI, REJOMULYO JADI KAMPUNG TANGGUH KOTA MADIUN

Madiun - Pandemi Covid-19 tak hanya mengacaukan bidang kesehatan, tapi sektor ekonomi juga ikut terganggu. Kehadiran Kampung Tangguh pun diharapkan mampu menjadi penyangga semua lini kehidupan warga sekitar.

Seperti di RT. 24 RW. 08 Kelurahan Rejomulyo, Kota Madiun yang baru saja diresmikan sebagai Kampung Tangguh Semeru. Tak hanya memiliki ketangguhan dalam melawan virus corona, tapi juga memiliki ketahanan ekonomi bagi keluarga di lingkungan tersebut Rabu (15/7).

Dalam peresmian tersebut, Walikota Madiun beserta jajaran Forkopimda keliling melihat setiap posko yang ada di Jalan Guna Jaya, Rejomulyo. Mulai dari Posko Kesehatan, Posko Keamanan, Ruang Isolasi Kampung Tangguh, Dapur Umum dan Lumbung Pangan.

Yang menarik dari Kampung Tangguh Rejomulyo adalah Kawasan Rumah Pangan Lestari. Awalnya, lokasi tersebut merupakan tempat kumuh dan tidak sedap dipandang. Namun oleh warga sekitar,



Walikota Madiun, Maldi saat melihat kebun hidroponik di Kelurahan Rejomulyo, Kota Madiun yang menjadi Kampung Tangguh Semeru

disulap menjadi lokasi yang nyaman untuk mengolah pikiran sambil menikmati kopi dari warung kejujuran. Selain itu, di kawasan tersebut juga sebagai area untuk budidaya jahe merah dan pasar tradisional mingguan.

Dalam sambutannya Maldi menyebutkan bila Kampung Tangguh Semeru yang ada di Rejomulyo sangat lengkap. Hal ini karena tidak hanya tangguh menangani Covid-19 tetapi juga tangguh menangani

ekonomi rakyat yang ada di Kelurahan-

nya. Dirinya berencana akan memprioritaskan Kampung Tangguh yang sudah lengkap seperti Kelurahan Rejomulyo sebagai jalur wisata sepeda. "Di Kota Madiun, rencananya semua Kelurahan menjadi Kampung Tangguh, tinggal meresmikan saja. Untuk saat ini yang belum diresmikan 12 Kelurahan," pungkasnya. (ger)

WEBSITE DIRETAS, KPU PASTIKAN DATA PEMILIH PILKADA 2020 AMAN

Jakarta-KPU meluncurkan Gerakan Klik Serentak (GKS) sebagai tanda dimulainya tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada Serentak 2020. Namun, begitu alamat website dipublikasikan dan diluncurkan Rabu (15/7), website untuk mengecek data pemilih langsung diretas.

Ketua KPU Arief Budiman memastikan data-data pemilih aman, meski situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id diretas. "Data publik tetap aman, serangan enggak sampai ke dalam-dalam database kita, makanya aman. Penyebab akibatnya hanya melambatnya sistem kita jadi lemot," ungkap Arief di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).

Ia menuturkan, selain di situs KPU, data-data pemilih juga sudah diback up di sistem lain. Pihaknya telah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, di mana peretasan situs KPU bukanlah yang pertama kali terjadi.

"Terhadap database kita enggak ada masalah, semua tersimpan diback up sudah cukup rapi. Sama persis kejadian terdahulu termasuk Situng, hacker yang masuk tak merusak data kita," jelas Arief.

Dalam peluncuran Gerakan Klik Serentak, rencana awalnya akan diikuti dengan KPU dari daerah hingga berdialog bersama tamu, salah satunya Ayu Ting Ting. Namun, rencana ini batal setelah situs KPU diretas.

"Sampai tadi pagi berharap masih bisa dilakukan dialog langsung dengan daerah, tapi hari ini makin tinggi kuantitas

serangannya. Tidak merusak web kita, aplikasi kita, tapi membuat kerjanya jadi lambat," ungkap Arief sebelumnya.

Situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id adalah situs yang memungkinkan pemilih mengakses dan mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih di Pilkada Serentak 2020. Termasuk mengecek apakah data yang dimiliki KPU sudah sesuai dengan kondisi pemilih masing-masing.

Arief mengatakan, gerakan mengecek data pemilih ini untuk mendukung coklit KPU. Yaitu proses verifikasi data pemilih dari DP4 Kemendagri menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), kemudian menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). "DPT itulah yang berisi data yang sudah final, di dalamnya ada daftar pemilih per TPS," pungkasnya. Untuk diketahui, jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pilkada 2020 sebanyak 105,852 juta pemilih.

Coklit Door to Door

Sementara itu, mulai 15 Juli sampai 13 Agustus KPU pun melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. Metodenya tetap sama seperti pilkada sebelumnya, yakni Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan coklit dengan menemui pemilih secara langsung satu per satu.

Namun, proses coklit dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. "Iya dilakukan door to door," ujar Komisioner KPU RI, Viryan Aziz.



Ketua KPU Arief Budiman

Ketentuan prosedur coklit diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. Sebelum diundangkan, KPU merencanakan proses coklit dilakukan berdasarkan RT/RW, bukan door to door untuk menghindari interaksi fisik dan mencegah penyebaran Covid-19.

Akan tetapi, Pasal 23 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan, PPDP melakukan coklit dengan menemui pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Petugas diwajibkan memenuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sarung tangan sekali pakai, pelindung wajah, menjaga jarak, tidak melakukan kontak fisik, dan mencuci tangan dengan sabun. (Ist)

PETAHANA WALIKOTA BLITAR GALANG DUKUNGAN HINGGA TINGKAT RT

Blitar - Geliat Pilwali di Kota Blitar makin intens. Petahana yaitu Walikota Blitar, Santoso mulai menggalang dukungan dengan Gerakan Relawan sampai tingkat RT. Langkah ini dilakukan sebagai bukti bila dia merangkul dan mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

"Prinsip bergerak dan bergerak, untuk membentuk pasukan relawan," tutur Santoso, Rabu (15/7).

Dijelaskan Walikota Santoso dengan adanya pasukan relawan tersebut, bisa memberikan akses dukungan dalam pencalonan dalam Pilwali tahun 2020 ini. "Dukungan dari siapa pun termasuk ulama, kiai dan masayik, semua pihak dan lapisan masyarakat," jelasnya.

Seperti dilakukan belum lama ini, relawan melakukan silaturahmi ke kediaman ulama dan tokoh agama, bersama KH Slamet Ihsan dan Pimpinan Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan KH Ali Mustofa di Pakunden, Sukorejo, Kota Blitar. Termasuk relawan sampai di tingkat RT pun, juga

terus bergerak.

Diungkapkan Santoso, pihaknya juga terus menjalankan tugas dalam koridor yang sudah ditentukan. "Terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, pemerintah harus selalu hadir di tengah masyarakat yang terdampak," ungkapnya.

Mengenai rekomendasi dari PDIP dan pasangan cawawali, Santoso menegaskan diperkirakan akan turun dalam waktu dekat. Demikian juga pasangannya juga tetap dengan Tjujuk Sunario dari Partai Gerindra. "InsyaAllah minggu depan, sudah A1 tinggal menunggu saja," tandasnya.

Seperti diketahui Walikota Santoso akan maju bertarung kembali dalam Pilwali Kota Blitar Tahun 2020, melalui PDIP dan santer kabarnya berkoalisi dengan Partai Gerindra berpasangan dengan Tjujuk Sunario. Karena dengan kekuatan 10 kursi PDIP dan Gerindra 2 kursi, maka kekuatan politik di parlemen hampir 50 persen dari total 25 kursi DPRD Kota Blitar.



Gerakan Relawan dari petahana Walikota Blitar, Santoso bergerak hingga tingkat RT

Lawannya adalah Henry Pradipta Anwar putra mantan Walikota Blitar Samanhuji Anwar, yang akan maju berpasangan dengan Ketua DPC PKB Kota Blitar, Yasin Hermanto diusung oleh Partai Golkar, PKS dan PKB. Sementara beberapa partai politik lainnya yang memiliki kursi di DPRD Kota Blitar, yaitu PPP, Demokrat dan Hanura masih belum memutuskan akan berkoalisi dengan cawawali siapa. (ais)



PERDANA MENTERI
Jacinda Ardern
PERANGI TERORIS
HINGGA WABAH CORONA

Foto : Derek Henderson, Vogue

Pemusnahan menjadi kata kunci dalam strategi Selandia Baru menghadapi wabah baru virus corona atau Covid-19.

Selandia Baru tidak akan mencabut strategi pemusnahan virus jika ditemukan transmisi komunitas, kata Perdana Menteri Jacinda Ardern, seperti dikutip Antara dari Reuters, Rabu (15/7/2020).

Ardern mengatakan epidemi itu kini "meledak" di luar Selandia Baru. Negara-negara yang menjadi contoh dalam perang melawan Covid-19 kini mengalami wabah komunitas lebih lanjut.

Pemerintah Selandia Baru merilis skema baru tentang strategi melawan virus apabila terjadi kasus baru/ Pemusnahan virus masih menjadi strategi utama.

"Tidak ada sistem yang 100 persen dapat dipercaya dan di seluruh dunia kami melihat bahkan langkah yang paling tegas sekalipun diuji oleh virus," katanya di hadapan awak media di Wellington.

Negara Pasifik Selatan itu terakhir melaporkan kasus transmisi komunitas dua setengah bulan yang lalu. Selandia Baru mencatat 22 kematian dari hampir 1.200 kasus terkonfirmasi hingga Rabu.

Selandia Baru bersumpah akan memusnahkan, bukan hanya mencegah, virus, yang berarti menghentikan transmisi selama dua pekan setelah kasus terakhir yang diketahui sembuh.

Pejabat di negara bagian padat penduduk Australia New South Wales menyebutkan pelenyapan virus tak lagi mungkin ada karena munculnya wabah

baru menyusul pelanggaran pembatasan Covid-19.

Sosok Jacinda Arden

Jacinda Ardern lahir sebagai bungsu dari dua bersaudara di Hamilton, Selandia Baru, pada 26 Juli 1980. Ayahnya, Ross Ardern, bekerja sebagai polisi, dan ibunya, Laurell Ardern, bekerja sebagai pekerja di kantin sekolah.

Jacinda Ardern tumbuh besar di Murupara, sebuah kota kecil di timur laut Wellington, sebelum akhirnya berpindah ke Morrinsville, Waikato, akibat kenaikan pangkat ayahnya.

Ia kemudian menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di kota ini. Ketika masih di sekolah dia menemukan pekerjaan pertamanya, bekerja di Fish and chip shop setempat.

Setelah menamatkan pendidikan menengahnya, Jacinda Ardern mengambil jurusan komunikasi politik di Universitas Waikato pada tahun 1999. Saat masih kuliah, Ardern dikenal telah aktif di dunia politik.

Ia bergabung dengan Partai Buruh Selandia Baru tak lama setelah menempuh pendidikan tinggi, di usia 17 tahun, pada 1999. Dengan bantuan bibinya, ia menjadi terlibat dalam kampanye pemilihan bHarry Duynhoven sebagai anggota parlemen di distrik New Plymouth.

Setelah meraih gelar sarjana dalam politik dan hubungan masyarakat, Ardern bekerja sebagai peneliti kebijakan politik untuk anggota parlemen lain dari partainya.

Pekerjaannya ini membuatnya

mendapat posisi sebagai staff dari Perdana Menteri yang menjabat saat itu, Helen Clark, wanita kedua yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Selandia baru.

Pada awal 2008, Ardern terpilih sebagai Presiden untuk Serikat Pemuda Sosialis Internasional, peran yang membuatnya menghabiskan waktu di beberapa negara, termasuk Yordania, Israel, Aljazair, dan Cina.

Tahun 2019 Jacinda Ardern, dipuji secara internasional atas penanganannya terhadap aksi teroris di Christchurch, masuk dalam daftar "100 orang paling berpengaruh" di majalah Time.

Daftar ini menampilkan 48 perempuan, termasuk aktor terkenal, olahragawan dan politisi, dan mewakili jumlah perempuan terbanyak sejak majalah Time mulai menerbitkan daftar ini pada tahun 2004.

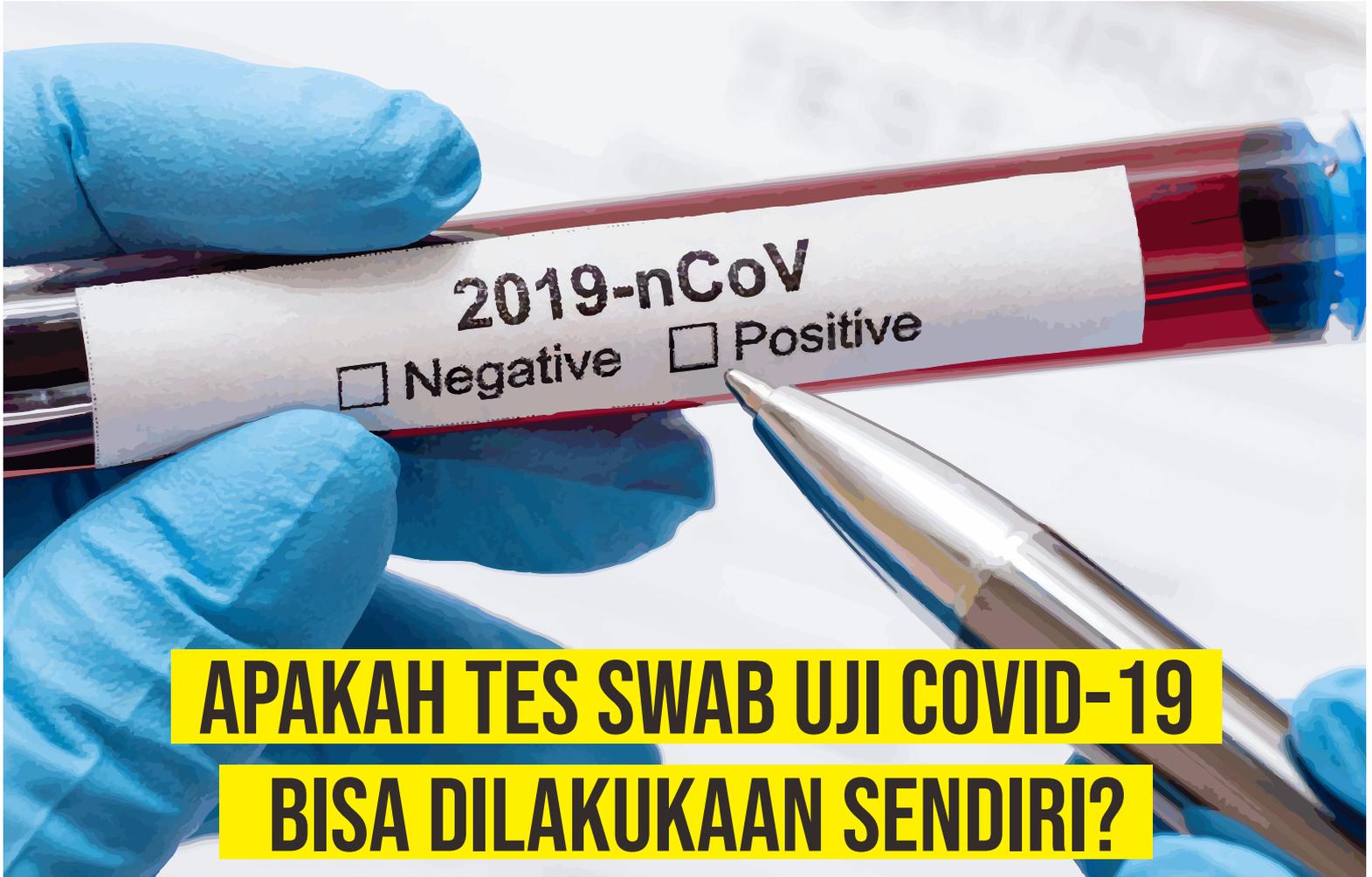
Walikota London -Sadiq Khan, menis kesan, PM Ardern disebut sebagai sosok yang penanganannya terhadap serangan teror Maret di Christchurch adalah "inspirasi bagi kita semua".

"Tak hanya ia melakukan tindakan cepat pada kontrol senjata, ia telah mengirim pesan yang kuat di seluruh dunia tentang nilai-nilai kita bersama - bahwa mereka yang berusaha memecah belah kita tidak akan pernah berhasil," tulis Khan.

"Selandia Baru akan selalu melindungi dan merayakan keragaman dan keterbukaan yang membuat negara-negara kita begitu hebat." (Ist)



Foto : [straitstimes.com](https://www.straitstimes.com)



APAKAH TES SWAB UJI COVID-19 BISA DILAKUKAKAN SENDIRI?

Bagi beberapa orang, tes swab untuk mendeteksi Covid-19 terasa lebih sakit ketika orang lain yang memasukkan alat pemeriksaan ke tenggorokan mereka.

Oleh karena itu sebagian masyarakat, terutama di Amerika Serikat, mencoba melakukan tes swab secara mandiri.

Lantas, apakah pemeriksaan mandiri ini akurat?

Metode ini ternyata disebut lebih efektif dan sama akuratnya dengan sampel yang dikumpulkan oleh tenaga kesehatan.

Hal tersebut dibuktikan lewat penelitian terbatas yang dipublikasikan di *Journal of the American Medical Association*.

Kelebihan tes swab mandiri

Selain lebih efektif dan sama akuratnya dengan pengujian yang dibantu oleh petugas kesehatan, tes swab Covid-19 mandiri memiliki kelebihan lainnya.

Alat pengumpulan sampel dapat didistribusikan secara luas, sehingga memungkinkan lebih banyak pengujian dilakukan.

Masyarakat yang melakukan tes swab mandiri tidak perlu datang ke rumah sakit atau lokasi pemeriksaan.

Hal ini dapat menurunkan risiko pe-

nularan virus ke petugas kesehatan atau orang lain yang berkontak dengan mereka.

Selain itu, tes swab mandiri juga menghemat persediaan alat pelindung diri (APD) yang digunakan tenaga kesehatan.

Bahkan, cara ini juga memungkinkan lebih banyak orang mengirimkan sampelnya karena mereka tidak lagi khawatir tertular virus ketika datang ke lokasi.

Maka itu, peneliti mulai mempertimbangkan apakah tes swab mandiri ini bisa dilakukan pada masyarakat luas.

Pasalnya, ada kebutuhan yang cukup mendesak dalam meningkatkan kapasitas pengujian virus agar dapat memperlambat penyebaran Covid-19.

Walaupun demikian, temuan awal ini cukup terbatas mengingat peserta dan sampelnya masih dalam ruang lingkup yang kecil.

Peneliti masih memerlukan studi lebih lanjut dengan uji klinis yang lebih beragam agar dapat diterapkan di semua tempat.

Pertimbangan tes swab sendiri

Tes swab Covid-19 mandiri memang menawarkan keunggulan. Namun, tidak menutup kemungkinan metode ini justru dapat menimbulkan masalah ketika tidak dilakukan dengan benar.

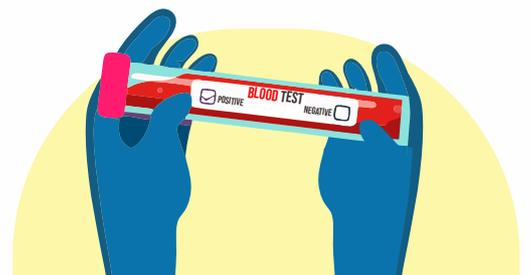
Oleh karena itu ada beberapa pertim-

bulan yang perlu dipikirkan ketika menjalani tes swab mandiri, seperti:

- tes swab mandiri dinilai kurang maksimal dibandingkan swab saluran atas
- cara penyimpanan saat sampel dikumpulkan bisa memengaruhi hasil
- harus dilakukan dengan instruksi dari tenaga kesehatan
- banyak negara yang belum menyetujui metode self-swab test

Tes swab COVID-19 mandiri mungkin akan menimbulkan kontroversial karena beberapa orang mungkin kesulitan membaca instruksi medis yang diberikan. Tantangan tersebut juga memengaruhi hasil akhir dari pengujian sampel.

Maka dari itu, pemerintah di negara yang sudah memperbolehkan metode ini menganjurkan agar pengumpulan sampel tetap harus diamati oleh staf yang terlatih (Ist).



GAYA HIDUP BERSEPEDA,

MENGEJAR TEKNOLOGI HINGGA GENGGSI



Gaya hidup bersepeda sedang menanjak saat ini. Berawal dari visi hemat energi sekaligus cara menjaga kesehatan atau kebugaran tubuh.

Sepeda kini naik daun gara-gara pandemi Covid-19.

Sepeda berkembang bukan hanya untuk olahraga tapi juga sarana transportasi yang tergolong aman.

Masalahnya, tidak semua sepeda bisa dinikmati semua orang. Ini bahkan jadi masalah terbesar yakni ukuran rangka atau frame sepeda belum tentu sesuai untuk semua orang dari berbagai tinggi badan.

Untuk mengatasinya, Arevo, perusahaan manufaktur pengguna teknologi 3D printing di Silicon Valley, Amerika Serikat, membuat terobosan membuat Superstrata, sepeda yang dibuat spesifik untuk pemernya.

Berkat teknologi 3D Printing dari Arevo, Superstrata bisa menentukan ukuran

frame sepeda tanpa mengukur ulang panjang lebarnya.

"Ukuran frame sepeda bisa disesuaikan dengan tinggi badan, berat badan, panjang lengan, dan kaki penggunanya," kata CEO Superstrata, Sonny Vu, kepada Tech Crunch 13 Juli 2020.

Dia mengklaim spesifik untuk setiap pengguna pemilik tinggi badan 139 cm sampai 223 cm.

Dengan lebih dari 500 ribu kombinasi, Superstrata menjadi sepeda berbahan serat karbon yang diyakinkannya nyaman untuk semua kalangan.

Vu mengatakan, teknologi 3D Printing yang dikembangkannya membuat frame sepeda Superstrata mulus tanpa ada bekas-bekas pengelasan, lipatan, maupun baut. Bahan serat karbon yang digunakan juga dikenal kuat dan tahan lama.

Namun ada harga untuk kenyamanan dan kualitas tersebut. Sepeda Superstrata dibanderol Arevo cukup tinggi. Versi yang

standar, Superstrata Terra, dijual sekitar \$ 2.799 (lebih dari Rp 40 juta).

Sedangkan Superstrata Ion lebih mahal lagi yakni \$ 3.999 (lebih dari Rp 58 juta).

Berbeda dengan Terra, Ion memiliki tenaga listrik yang otomatis mengayuh hingga 88 kilometer dan membutuhkan dua jam untuk isi ulang dayanya hingga penuh.

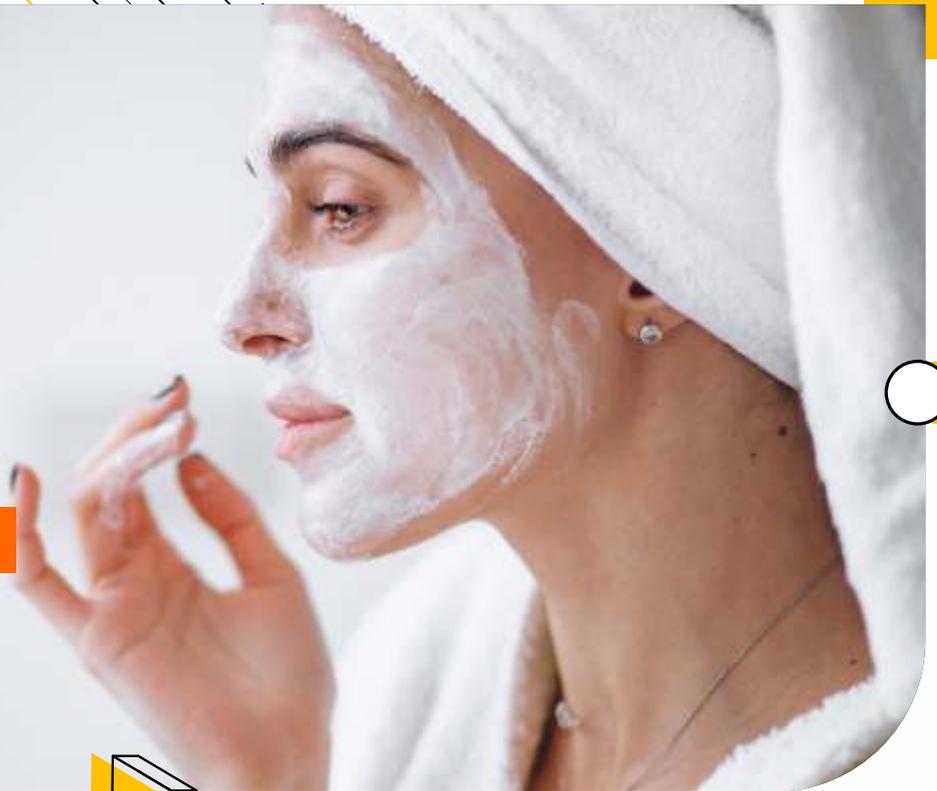
Harga itu dipandang masih masuk akal dibandingkan dengan sepeda konvensional dari material yang sama, serat karbon, yang bisa dihargai sampai \$ 12 ribu (Rp 174 juta).

Untuk saat ini, Superstrata menargetkan pasar dari para atlet dan juga hobiis sepeda. Sepeda Superstrata diperkirakan akan dijual di pasaran mulai Desember 2020.

"Seluruh proses dari menggambar sampai ke prototipe siap produksi butuh waktu dua bulan," kata Vu lagi. (Ist).

Wajah Bersih dari Jerawat

DENGAN PERAWATAN ALAMI



Ingin memiliki wajah bersih dari jerawat tapi dengan produk alami? Bukan hal yang sulit. Bahkan, dengan perawatan tradisional, risiko kulit bermasalah menjadi sangat minim. Intip caranya.

Untuk rekomendasi bahan alami apa yang digunakan, kamu bisa memanfaatkan teh hijau, lemon atau jeruk nipis, maupun abu vulkanik. Ya, abu dari gunung berapi itu memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan kulit

wajah.

Melansir dari Medical News Today, abu vulkanik itu memiliki banyak sekali manfaat untuk wajah. Salah satunya adalah mengatasi wajah berjerawat. Ini bisa bekerja karena abu vulkanik menghambat

produksi minyak di wajah dan meminimalisir terbentuknya jerawat. Serta manfaat lain dari abu vulkanik adalah detoksifikasi kulit. Nah, karena mencari abu vulkanik sulit kamu bisa gunakan tiga langkah perawatan wajah alami ini.



Scrubing wajah

Langkah perawatan wajah lainnya ialah scrubing. Jika Anda memiliki wajah sensitif, maka bahan alami sangat cocok untuk Anda. Sebab, bahan kimia di dalam ramuan ini tidak ada dan itu meminimalisir inflamasi di wajah. Cara membuat ramuannya ialah gunakan 1 sdm gula halus, kemudian tambahkan 1 sdm teh hijau. Setelah itu, haluskan lalu tambahkan 1 sdm madu dan air secukupnya. Scrubing pun siap dilakukan. Ingat, gosok wajahnya dengan lembut, ya.



Masker wajah

Ini adalah tahapan perawatan wajah selanjutnya. Dengan masker wajah, Anda mengembalikan kelembapan wajah dan dengan begitu hasilnya akan maksimal. Untuk ramuan masker wajah alami, Anda bisa membuatnya dengan bahan-bahan seperti 1 sdm abu vulkanik, dicampur dengan perasan jeruk nipis. Jangan lupa untuk tambahkan air mawar, ya. Masker alami siap diaplikasikan di wajah selama 15-20 menit. Bilas dan lihat hasilnya.



Menguap Wajah

Tahapan perawatan wajah terakhir. Dengan melakukan penguapan wajah, Anda membuat wajah lebih segar dan membuka pori-pori. Dengan begitu, wajah bisa bersih maksimal dan setelah itu wajah tampak segar dan sehat. Cara membuat ramuannya ialah masukkan 2 jeruk nipis ke wadah, lalu tambahkan 2 sdm teh hijau. Kedua bahan alami itu disiram air mendidih 300 ml. Lakukan penguapan wajah selama 15 menit, ya. (Ist)

Duh! orang (dari hal 1)

Sesuai prediksi, angka kemiskinan Indonesia langsung melesat tinggi akibat makin mewabahnya virus Covid-19. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan peningkatan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Pasalnya, aktivitas perekonomian menjadi terganggu dan memengaruhi pendapatan penduduk.

"Penduduk miskin naik 1,63 juta terhadap September 2019," ujar Suhariyanto dalam paparannya, Rabu (15/7).

Secara persentase, untuk persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen meningkat 0,56 poin persentase terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 poin persentase terhadap Maret 2019. Lebih lanjut, dia pun mengatakan, kondisi pandemi ini memengaruhi seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian, dampak yang lebih dalam paling dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah. Berdasarkan hasil survei sosial demografi BPS, kelompok masyarakat lapisan bawah atau berpendapatan rendah, 70 persen mengaku mengalami penurunan pendapatan.

Sementara untuk masyarakat berpendapatan tinggi, yakni di atas Rp 7,2 juta, sebanyak 30 persen mengaku pendapatannya berkurang selama pandemi. "Pandemi Covid-19 ini menghantam seluruh lapisan masyarakat dan dampaknya terasa lebih dalam ke masyarakat lapisan bawah," kata Suhariyanto.

Menurut survei sosial demografi BPS, pendapatan 4 dari 10 orang Indonesia turun saat pandemi merebak. Pendapatan yang turun jelas menggerus daya beli masyarakat, sehingga masyarakat cenderung menghemat atau bahkan memangkas konsumsinya.

Hal tersebut tercermin dari perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sangat signifikan. Pada Maret 2019 konsumsi domestik masih mampu tumbuh di angka 5% (yoy). Namun Maret tahun ini pertumbuhannya melambat menjadi 2,8% (yoy).

Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin karena terdampak Covid-19. "Meskipun Covid-19 awal Maret 2020, pariwisata sudah terdampak sejak Februari ini terlihat dari penurunan jumlah wisatawan mancanegara. Berdampak ke hotel, penginapan, dan perajin," ucap dia.

Jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 1,9 juta orang, tertinggi di DKI Jakarta. Mayoritas provinsi mengalami kenaikan persentase kemiskinan. Tertinggi DKI, naik 1,11 poin. Jabar naik 1,06 poin.

Jatim, Yogyakarta juga naik," katanya.

BPS melaporkan peningkatan cukup tajam terjadi di perkotaan. Secara persentase, penduduk miskin di perkotaan mencapai 7,38 persen, naik dibandingkan September 2019 sebesar 6,56 persen. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020.

"Penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020)," demikian laporan BPS, Rabu (15/7).

Adapun penduduk miskin di daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang, dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020.

DKI Jakarta, yang disebut paling tinggi kenaikannya, pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 480,86 ribu orang. Sementara pada September 2019 jumlahnya 362,30 ribu orang.

Sementara Jawa Barat, penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebanyak 2,7 juta orang. Sedangkan pada periode September 2019 jumlahnya 2,2 juta orang.

Untuk Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652 per kapita per bulan, dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 335.793 (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 118.859 (26,14 persen).

Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, dari hitungan BPS besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.118.678 per rumah tangga miskin per bulan.

Gantian Jabar Miliki Kasus Baru Tertinggi

Kasus positif virus COVID-19 di Indonesia menjadi 80.094 orang per 15 Juli 2020. Jumlah ini berdasarkan data yang masuk ke pemerintah pusat hingga Rabu siang, baik tes real time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) maupun Tes Cepat Molekuler (TCM).

Juru Bicara Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan, terdapat 24.871 specimen yang diperiksa per hari ini. "Kami dapatkan kasus baru konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1.522 orang," kata Yurianto saat menyampaikan perkembangan kasus Corona di Graha BNPB Jakarta, Rabu (15/7).

Jika dilihat lebih rinci, kata Yurianto, sebaran penambahan kasus baru tersebut paling tinggi adalah Jawa Tengah, yaitu 261 kasus dan sembuh 120 pasien. Namun secara nasional, Jatim menjadi provinsi dengan kasusterbanyak, melampaui DKI Jakarta.

Posisi kedua yang menyumbang kasus baru hari ini DKI Jakarta, yaitu sebanyak 260 orang dan sembuh 193 pasien. Sementara Jawa Timur menempati posisi ketiga dengan tambahan kasus baru sebanyak 165 orang dan 521 sembuh.

Dua provinsi lain yang masuk lima besar adalah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, masing-masing adalah 158 kasus baru untuk Sulsel, dan 109 kasus baru di Kalsel. Provinsi dengan kasus baru cukup tinggi berikutnya adalah Sumatra Utara dengan 99 orang kasus baru. Sementara Jawa Barat yang pada 9 Juli 2020 kasus barunya mencapai 962 orang, per hari ini melaporkan kasus baru sebanyak 75 kasus dan 140 pasien sembuh.

"Ada 17 provinsi yang hari ini melaporkan kasusnya di bawah 10 orang, bahkan ada 6 provinsi tidak ada penambahan kasus baru," kata Yurianto. Berdasarkan data terbaru, pasien COVID-19 yang dilaporkan sembuh hari ini bertambah 1.414 kasus, sehingga total menjadi 39.050 pasien. Sedangkan kasus meninggal bertambah 87 orang, total 3.797 kasus. Sementara itu, kasus suspek per hari ini dilaporkan sebanyak 47.859 orang. (ist,ins)

PROVINSI YANG MENCATAT KESEMBUHAN CORONA TINGGI

Jawa Timur

- Sembuh: 521
- Kasus baru: 165

Jawa Barat

- Sembuh: 140
- Kasus baru: 75

Gorontalo

- Sembuh: 19
- Kasus baru: 7

Banten

- Sembuh: 33
- Kasus baru: 3

Sumatera Barat

- Sembuh: 5
- Kasus baru: 2

Bangka Belitung

- Sembuh: 4
- Kasus baru: 1

Jambi

- Sembuh: 2
- Kasus baru: 1

Sulawesi Tengah

- Sembuh: 7
- Kasus baru: 1

Kalimantan

- Sembuh: 30
- Kasus baru: 0

Riau

- Sembuh: 1
- Kasus baru: 0

Papua Barat

- Sembuh: 4
- Kasus baru: 0

TOP 5

PENAMBAHAN KASUS POSITIF BARU

- Jawa Tengah: 261
- DKI Jakarta: 260
- Jawa Timur: 165
- Sulawesi Selatan: 158
- Kalimantan Selatan: 109

KAPOLRI COPOT BRIGJEN PRASETIJO TERKAIT 'SURAT SAKTI' DJOKO TJANDRA

Jakarta- Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat telegram pencopotan Brigjen Prasetijo Utomo. Surat pencopotan tersebut diteken langsung oleh AsSDM Kapolri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan.

Surat pencopotan tersebut tertuang dengan nomor ST/1980/VII/KEP/2020. Dalam surat tersebut Brigjen Prasetijo dimutasi dari Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPN Bareskrim Polri ke Pati Yanma Polri. Selain itu, dalam telegram tersebut Brigjen Prasetijo menjalani pemeriksaan.

Terkait keputusan ini, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menegaskan, Kapolri berkomitmen penuh untuk menindak tegas anggota Polri yang tak taat aturan. Hal ini juga diterapkan kepada Brigjen Prasetijo Utomo.

"Komitmen Kapolri, Kakorwas PPNS BJP PU dicopot dari jabatannya," ujar Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (15/7).

Djoko Tjandra mendapat 'surat sakti' yang dikeluarkan Biro Koordinasi dan Pengawasan PPN Bareskrim Polri. Surat tersebut tertuang dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020. Surat tersebut diteken Brigjen Prasetijo Utomo. Dalam surat tersebut Djoko diagendakan berangkat pada 19 Juni dan pulang 22 Juni 2020. Namun, hingga saat ini Djoko tak diketahui keberadaannya.

Indonesia Police Watch (IPW) membeberkan ihwal siapa sebenarnya sosok Brigjen Prasetijo. Prasetijo Utomo

lahir di Jakarta 16 Januari 1970. Dia adalah alumni angkatan polisi (Akp) pada tahun 1991 yang merupakan teman seangkatan Kabareskrim Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Prasetyo Utomo sendiri adalah alumni Akpol 1991, teman satu Angkatan dengan Kabareskrim Komjen Sigit," kata koordinator IPW Neta.

Selain Listyo, Prasetijo merupakan seangkatan dengan sejumlah jenderal-jenderal yang tengah berada di pucuk pimpinan Polri. Di antaranya, Kapolda Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Iqbal hingga Brigjen Krishna Murti menjabat Karomisinter Divhubinter Polri. Lalu, Irjen Mohammad Fadil Imran yang kini menjabat Kapolda Jawa Timur yang juga merupakan alumni Akpol 1991.

Djoko Soegiarto Tjandra memang sakti. Terpidana dua tahun penjara dalam kasus korupsi pengalihan hak tagih atau "cessie" Bank Bali senilai Rp 904 miliar sudah menjadi buron Kejaksaan Agung selama 11 tahun sejak 2009. Dia pun selalu mampu mengelabui petugas.

Mulai dari petugas imigrasi, petugas bandar udara, petugas pembuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, hingga petugas pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel.

Bahkan bukan hanya mengelabui, Djoko Tjandra juga diduga mendapat fasilitas dan "privilege" atau perlakuan istimewa dari sejumlah pihak.

JEJAK BURONAN DJOKO TJANDRA DI INDONESIA

AWAL MEI 2020

Djoko Tjandra diperkirakan tiba di Indonesia dari Luar Negeri. Ada dua skenario. Dia masuk dari Malaysia atau dari Papua Nugini

8 JUNI 2020

Djoko datang pagi-pagi ke kantor Lurah Grogol Selatan lalu menuju ke PN Jakarta Selatan untuk mendaftarkan peninjauan kembali

7 JUNI 2020

Pengacara Kolopaking menghubungi Djoko soal rencana pembuatan KTP Elektronik baru di Kelurahan Grogol Selatan

22 JUNI 2020

Djoko pergi ke kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk memperpanjang Paspor Indonesia

AKHIR JUNI 2020

Djoko diperkirakan sudah meninggalkan Indonesia



Diketahui petugas pembuat KTP di Satuan Pelayanan (Satpel) Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kelurahan Grogol Selatan bisa memproses e-KTP Djoko kurang dari satu jam. Bahkan

hanya bermodalkan foto KTP dan Kartu Keluarga (KK) lama yang dikirim ke telepon seluler Lurah Grogol Selatan Asep Subahan, permohonan pembuatan KTP-nya langsung diproses. Dia juga ditemui langsung Lurah Grogol Selatan Asep Subahan dan diantarkan ke Satpel Sudin Dukcapil. Asep dinonaktifkan dari jabatannya karena terbukti membantu buronan Kejagung Djoko Tjandra dalam menerbitkan e-KTP.

Sebelumnya, wacana pembentukan panitia khusus (pansus) mengusut buron kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra, mengemuka. Wacana tersebut bakal ditindaklanjuti oleh pimpinan Komisi III DPR. "Terkait pansus akan kami bicarakan secara internal, semua fraksi harus bertemu," kata Ketua Komisi III DPR Herman Hery.

Politikus PDIP itu menyebutkan, setiap anggota maupun fraksi berhak mengusulkan pembentukan pansus mengawal pengusutan kasus Djoko. Namun, usulan itu harus mendapat kesepakatan seluruh fraksi. "Jika mayoritas tidak menginginkan pansus maka tidak akan kami lakukan. Kami berjalan sesuai mekanisme saja," ujar dia.

Pembentukan Pansus Djoko Tjandra mengemuka pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting. Usulan itu disampaikan Fraksi Demokrat dan NasDem. (ist)



Brigjen Prasetijo Utomo (insert- Buronan Djoko Tjandra)